

**PERMINTAAN PROPOSAL/ REQUEST FOR PROPOSALS (RFP):
ADVOKASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL UNTUK KETAHANAN PANGAN DI SUMATERA BARAT /
SOCIAL FORESTRY POLICY ADVOCACY FOR FOOD SECURITY IN WEST SUMATERA**

RINGKASAN PEMBELIAN/ SUMMARY OF PROCUREMENT

WRI Indonesia bermaksud untuk memberikan kontrak Harga Tetap (didukung oleh capaian & faktur) untuk jasa advokasi kebijakan perhutanan sosial untuk ketahanan pangan di Sumatera Barat. Rincian lebih lengkap akan menyusul di bawah. Penyedia yang terpilih akan menyerahkan capaian untuk disetujui dan bekerja sama dengan tim WRI Indonesia. Kontrak akan ditandatangani oleh WRI Indonesia dan akan dibayarkan dari rekening WRI Indonesia, mengikuti peraturan Indonesia. / *WRI Indonesia intends to award a Fixed Price (to be supported by deliverables & invoices) type contract for the service of social forestry policy advocacy for food security in West Sumatera. More extensive details will follow below. The chosen vendor will submit deliverables for approval to and work closely with the WRI Indonesia team. The contract will be signed by WRI Indonesia and will be paid from WRI Indonesia accounts, following Indonesia regulations.*

Tentang WRI Indonesia/ About WRI Indonesia

WRI Indonesia adalah organisasi penelitian independen yang berdedikasi untuk berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan kami difokuskan pada enam bidang utama: hutan, iklim, energi, kota dan transportasi, tata kelola, serta laut. Kami mengaktualisasikan gagasan-gagasan besar menjadi aksi nyata pada titik temu yang menghubungkan lingkungan dengan peluang ekonomi dan kesejahteraan manusia. / *WRI Indonesia is an independent research organization dedicated to contributing to the socioeconomic development of Indonesia in an inclusive and sustainable way. Our work is focused on six main areas: forests, climate, energy, cities and transportation, governance, as well as ocean. We turn big ideas into action at the nexus of environment, economic opportunity, and human well-being.*

Didirikan pada Januari 2014 dengan kantor pusat di Jakarta, WRI Indonesia berafiliasi dengan World Resources Institute, lembaga kajian lingkungan global berbasis di Washington D.C. WRI memiliki jaringan penelitian yang beranggotakan lebih dari 450 tenaga ahli dan staf di lebih dari 50 negara, dengan kantor di Tiongkok, India, Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Di Indonesia, kami telah mengerjakan proyek bersama dengan mitra-mitra kami selama lebih dari 20 tahun, dan WRI Indonesia didirikan untuk membangun keberadaan dalam negeri yang kuat, membuat formal kemitraan yang telah terbentuk, serta memperkuat penelitian lapangan kami. / *Established in January 2014 with its headquarter in Jakarta, WRI Indonesia is a non-profit research organization affiliated with the World Resources Institute, a global environmental think tank based in Washington D.C. WRI has a research network of over 450 experts and staff in more than 50 countries with offices in China, India, Indonesia, Europe and the United States. In Indonesia, we have run projects with partners for over 20 years, and WRI Indonesia was formally launched to build a robust in-country presence, to formalize existing partnerships, as well as strengthen our research on the ground.*

Tentang Advokasi kebijakan perhutanan sosial untuk ketahanan pangan di Sumatera Barat / **About the** *Social forestry policy advocacy for food security in West Sumatera*

Pada tahun 2023, WRI Indonesia bersama dengan Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) dan Perkumpulan QBAR Indonesia Madani melakukan studi "Perhutanan Sosial dan Ketahanan Pangan di Sumatera Barat." Studi tersebut berupaya melihat peranan hutan (melalui skema Perhutanan Sosial) terhadap ketahanan pangan lokal di tiga Nagari: Salibutan, Kurai, dan Alahan Mati di Sumatera Barat / *In 2023, WRI Indonesia together with Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) dan Perkumpulan QBAR Indonesia Madani conducted a study "Social Forestry and Food Security in West Sumatera." The study seeks to see the role of forests (through the Social Forestry scheme) on local food security in three Nagari: Salibutan, Kurai, and Alahan Mati in West Sumatera.*

Hasil studi menunjukkan bahwa sekitar 78 persen ketahanan pangan rumah tangga masyarakat di nagari-nagari tersebut berada di tingkat sedang. Sumber daya hutan berkontribusi terhadap ketahanan pangan lokal secara langsung (direct) dengan menyediakan berbagai sumber bahan pangan untuk dikonsumsi langsung; secara tidak langsung (indirect) sebagai sumber pendapatan rumah tangga melalui penjualan hasil hutan bukan kayu (HHBK); dan melalui sistem agroforestri, di mana hutan memberikan jasa ekosistem yang berperan penting bagi pertanian di tiga nagari tersebut. / *The results showed that around 78 percent of household food security in these villages was at a moderate level. Forest resources contribute to local food security directly by providing various sources of food for direct consumption; indirectly as a source of household income through the sale of non-timber forest products (HHBK); and through agroforestry systems, where forests provide ecosystem services that play an important role in agriculture in the three Nagari.*

Dalam konteks budaya Minangkabau, penelitian di tiga nagari menunjukkan bahwa kepemilikan dan pengolahan lahan pertanian, khususnya sawah merupakan pusako tinggi dengan luas lahan sekitar seperempat hektar/rumah tangga. Kepemilikan lahan untuk ladang (parak) berkisar antara 0,25 Ha hingga 1 Ha, sedangkan kepemilikan sawah dari pusako cenderung rendah, antara 0,25 Ha hingga 0,75 Ha. Akses fisik terhadap pangan dinilai memadai, namun, keterjangkauan ekonomi dipengaruhi oleh pilihan sistem pengelolaan lahan. Jumlah cadangan pangan yang dimiliki oleh masyarakat turut dipengaruhi oleh luas lahan sawah dan ladang (parak). / *In the context of Minangkabau culture, research in three Nagari shows that the ownership and processing of agricultural land, especially rice fields, is a high heritage with a land area of about a quarter of a hectare / household. Land ownership for fields (parak) ranges from 0.25 Ha to 1 Ha, while rice ownership from heritage tends to be low, between 0.25 Ha to 0.75 Ha. Physical access to food is considered adequate, however, economic affordability is influenced by the choice of land management system. The amount of food reserves owned by the community is also influenced by the area of rice fields and fields (parak).*

Melihat bagaimana hutan memiliki peran yang cukup signifikan dalam ketahanan pangan lokal di Sumatera Barat, penting untuk melakukan advokasi terkait kebijakan yang mengkaitkan hutan dengan sistem pangan lokal. Saat ini belum ada regulasi yang secara khusus menargetkan hal tersebut di Sumatera Barat. Implementasi Perhutanan Sosial masih pada tahap memberikan akses manajemen hutan pada masyarakat, akan tetapi terbatas dalam memastikan bahwa pemanfaatan hutan tersebut memiliki implikasi yang baik bagi sistem pangan lokal, dll. / *Seeing how forests play a significant role in local food*

security in West Sumatra, it is important to advocate for policies that link forests to local food systems. Currently, there is no regulation specifically targeting this in West Sumatra. The implementation of Social Forestry is still at the stage of providing access to forest management to communities, but is limited in ensuring that the use of these forests has good implications for local food systems, etc.

Riset kami menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis Perhutanan Sosial (PS) yang dikelola dengan memperhatikan prinsip keterlindungan hutan, dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat lokal yang berkelanjutan.

Maka dari itu, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan draft advokasi mendukung perhutanan sosial dalam rangka mendukung ketahanan pangan di wilayah Sumatera Barat dengan penekanan sebagai berikut : */ Our research shows that Social Forestry-based forest management, which is managed by taking into account the principles of forest protection, can strengthen the sustainable food security of local communities. Therefore, the purpose of this activity is to provide a draft advocacy to support social forestry to support food security in the West Sumatra region with the following emphasis:*

1. Meningkatkan kesadaran pemerintah lokal bahwa sistem pangan dan ekosistem hutan memiliki potensi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi masyarakat. */ Increase local government awareness that food systems and forest ecosystems have the potential to improve people's food security and nutrition.*

2. Meningkatkan kesadaran pemerintah bahwa masyarakat lokal adalah penerima manfaat utama dan pengelolaan sumber daya hutan harus dilakukan bersama dengan mereka. */ Increase government awareness that local communities are the main beneficiaries, and that forest resource management must be done together with them.*

3. Mengeksplorasi potensi dan pengembangan pangan hutan. Dalam hal ini pembagian manfaat dari hutan tersebut harus dipastikan adil, dengan fokus pada peningkatan kondisi kehidupan dan pendapatan serta kemandirian pangan bagi masyarakat lokal. */ Explore the potential and development of forest food. In this case, the distribution of benefits from these forests must be ensured fairly, with a focus on improving living conditions and incomes as well as food independence for local communities.*

4. Meningkatkan upaya pemerintah untuk mendorong konservasi area hutan berbasis kearifan lokal. Draft advokasi ini kemudian akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten setempat agar dapat dimasukkan ke dalam RPJMD/RPJPD di tingkat Kabupaten atau Provinsi menyesuaikan kesepakatan dengan para stakeholder */ Increase government efforts to encourage conservation of forest areas based on local wisdom. This advocacy draft will then be submitted to the local district government so that it can be included in the RPJMD/RPJPD at the district or provincial level according to agreement with stakeholders.*

LINGKUP PEKERJAAN DAN KELUARAN/CAPAIAN KERJA / SCOPE OF WORK AND OUTPUTS/DELIVERABLES

Penyedia akan memiliki peran dalam mendukung proses advokasi kebijakan perhutanan sosial untuk ketahanan pangan di Sumatera Barat melalui empat fase: Fase 1 – Persiapan diskusi dan konsultasi strategis bersama stakeholders di tingkat provinsi dan regional: vendor akan mempersiapkan dokumen dan merancang kegiatan untuk FGD di tingkat provinsi, guna mendapatkan gambaran awal terkait sistem pangan di Sumatera Barat; Fase 2 - Diskusi dan Konsultasi strategis bersama stakeholders di tingkat provinsi dan kabupaten: fase ini akan berfokus pada proses konsultasi dan diskusi bersama key

stakeholders untuk isu perhutanan sosial dan ketahanan pangan di Sumatera Barat; Fase 3 – Proses Penulisan Draft Advokasi untuk RPJMD/RPJPD Kabupaten/Provinsi di tingkat Kabupaten: fase ini akan berfokus pada proses drafting langkah-langkah konkrit atau prioritas terkait perhutanan sosial dan ketahanan pangan di 2 Kabupaten prioritas; Fase 4 – Proses Revisi dan Penyerahan Policy Brief dan Legal Draft RPJMD/RPJPD: fase ini akan berfokus pada proses penyempurnaan policy brief dan RPJMD dan melakukan seminar/lokakarya untuk diseminasi advokasi yang sudah dituliskan untuk mendukung perhutanan sosial dan ketahanan pangan masuk ke dalam RPJMD/RPJPD Kabupaten/Provinsi. / *Vendors will have a role to play in supporting the advocacy process for social forestry policies for food security in West Sumatra through four phases: Phase 1 – Preparation of discussions and strategic consultations with stakeholders at the provincial and regional levels: vendors will prepare documents and design activities for FGDs at the provincial level, to get an initial picture of the food system in West Sumatra; Phase 2 - Discussion and Strategic Consultation with stakeholders at the provincial and district levels: this phase will focus on the consultation process and discussion with key stakeholders on the issue of social forestry and food security in West Sumatra; Phase 3 – Advocacy Draft Writing Process for District RPJMD at District level: this phase will focus on drafting concrete steps or priorities related to social forestry and food security in 2 priority districts; Phase 4 – Process of Revision and Submission of Policy Brief and Legal Draft RPJMD/RPJPD: this phase will focus on the process of improving the policy brief and RPJMD and conducting seminars/workshops for dissemination of advocacy that has been written to support social forestry and food security into the District/Provincial RPJMD/RPJPD.*

Fase Pengerjaan/ Working Phase	Linimasa/ Timeline	Lingkup Pekerjaan/ Scope of Work	Capaian/Deliverables
Fase 1/ Phase 1 – Persiapan diskusi dan konsultasi strategis bersama stakeholders di Provinsi dan Regional/ <i>Preparation of discussions and strategic consultations with stakeholders in the Province and Region</i>	Durasi pengerjaan: 2 minggu./ <i>Duration of work: 2 weeks</i> Ekspektasi/Expectations: Juni 2024/June 2024	Persiapan perencanaan kegiatan dan strategi konsultasi bersama stakeholders di provinsi dan regional. / <i>Preparation of activity planning and consultation strategies with provincial and regional stakeholders.</i>	Capaian 1/ Deliverable 1: 1. ToR dan RAB kegiatan FGD/Workshop di tingkat provinsi bersama stakeholders (mengundang pemerintah provinsi dan regional). / <i>ToR and RAB FGD/Workshop activities at the provincial level with stakeholders (inviting provincial and regional governments).</i>
Fase 2 / Phase 2 - Diskusi dan Konsultasi strategis bersama stakeholders di tingkat provinsi dan regional / <i>Strategic discussions and consultations with stakeholders at the provincial and regional levels</i>	Durasi Pengerjaan tidak lebih dari 4 minggu. / <i>Duration of work is not more than 4 weeks</i> Ekspektasi/Expectations Juni – Juli 2024 / <i>June – July 2024</i>	Diskusi awal dan workshop/FGD bersama para pemangku kepentingan strategis (pemerintah provinsi dan regional) sebagai kick-off policy advocacy dan rekomendasi pemilihan kabupaten prioritas / <i>Initial discussion and workshop/FGD with strategic stakeholders (provincial and regional governments) as kick-off Policy advocacy and recommendations for priority district elections.</i>	Capaian 2 /Deliverable 2: 1. FGD di tingkat provinsi terkait ketahanan pangan dan perhutanan sosial / <i>FGDs at the provincial level related to food security and social forestry.</i> 2. Analisis dan Report dari workshop/FGD serta konsultasi/audiensi/FGD di tingkat provinsi dan terkait kondisi ketahanan pangan dan potensi hutan untuk menopang hal tersebut / <i>Analysis and Report from workshops/FGDs as well as consultations/hearings/FGDs at the provincial level and related to the</i>

			<p><i>condition of food security and the potential of forests to sustain it.</i></p> <p>3. Pemilihan lokasi Kabupaten Prioritas untuk advokasi kebijakan / <i>Pemilihan lokasi Kabupaten Prioritas untuk advokasi kebijakan.</i></p>
<p>Fase 3 / Phase 3 – Proses Penulisan Policy Brief dan legal draft RPJMD/RPJPD di tingkat Kabupaten/Provinsi / <i>Policy Brief Writing Process and legal draft of RPJMD/RPJPD at District/Provincial level</i></p>	<p>Durasi Pengerjaan tidak lebih dari 4 minggu. / <i>Duration of work is not more than 4 weeks</i></p> <p>Ekspektasi/Expectations Juli 2024 / July 2024</p>	<p>Seri konsultasi, audiensi, dan focus group discussion terkait perhutanan sosial dan ketahanan pangan di tingkat Nagari atau Kabupaten Prioritas / <i>A series of consultations, hearings, and focus group discussions related to social forestry and food security at the Nagari or Priority District level.</i></p> <p>Proses penulisan/drafting policy brief dan legal draft mengarah ke RPJMD untuk kebijakan perhutanan sosial dan ketahanan pangan di 1 atau 2 Kabupaten Prioritas. / <i>The process of drafting a policy brief and legal draft leads to the RPJMD for social forestry and food security policies in 1 or 2 priority districts.</i></p> <p>Proses audiensi dan FGD terkait draft policy brief dan legal draft untuk RPJMD ke stakeholder terkait di tingkat Kabupaten / <i>The hearing process and FGD related to the draft policy brief and legal draft for RPJMD to relevant stakeholders at the district level</i></p>	<p>Capaian 3 / Deliverable 3:</p> <p>1. Short report hasil diskusi/audiensi dengan stakeholders di tingkat Nagari/Kabupaten terkait Perhutanan Sosial dan Ketahanan Pangan / <i>Short report on the results of discussions/hearings with stakeholders at the Nagari/District level related to Social Forestry and Food Security.</i></p> <p>2. Draft kasar Policy Brief terkait Perhutanan Sosial dan Ketahanan Pangan / <i>Rough draft of Policy Brief on Social Forestry and Food Security.</i></p> <p>3. Legal draft RPJMD/RPJPD Kabupaten/Provinsi (sesuai pilihan yang disepakati bersama stakeholder) terkait Ketahanan Pangan dan Perhutanan Sosial / <i>Legal draft of District/Provincial RPJMD/RPJPD (according to options agreed upon with stakeholders) related to Food Security and Social Forestry.</i></p>
<p>Fase 4/ Phase 4 - Proses Revisi dan Penyerahan Policy Brief dan Legal Draft RPJMD / <i>Process of Revision and Submission of Policy Brief and Legal Draft of RPJMD</i></p>	<p>Durasi Pengerjaan tidak lebih dari 8 minggu. / <i>Duration of work is not more than 8 weeks</i></p> <p>Ekspektasi/Expectations Agustus - September 2024</p>	<p>Proses revisi dan penyempurnaan policy brief dan legal draft untuk RPJMD terkait ketahanan pangan dan perhutanan sosial. Termasuk proses seremonial event terkait policy brief and legal draft RPJMD / <i>The process of revising and refining the policy brief and legal draft for the RPJMD related to food security</i></p>	<p>Capaian 4 / Deliverable 4:</p> <p>1. Final draft Policy Brief dan legal draft untuk RPJMD/RPJPD Kabupaten/Provinsi terkait ketahanan pangan dan perhutanan social / <i>Final draft Policy Brief and legal draft for RPJMD/RPJPD District/Province related to food security and social forestry.</i></p> <p>2. Seremonial event: diseminasi policy brief dan legal draft RPJMD/RPJPD Kabupaten/Provinsi terkait ketahanan</p>

	/ August – September 2024	and social forestry. Including the ceremonial event process related to the policy brief and legal draft of the RPJMD.	pangan dan perhutanan social / Ceremonial event: dissemination of policy brief and legal draft of RPJMD/RPJPD District/Province related to food security and social forestry.
--	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN/ WORK IMPLEMENTATION SCHEDULE

Waktu/ Time	Aktivitas / Activity	Capaian/ Deliverables
5 Juni / June 5 th , 2024	Batas waktu untuk / <i>Deadline for:</i> 1. ToR dan RAB Kegiatan FGD di tingkat provinsi / <i>ToR and RAB FGD activities at the provincial level</i>	Capaian 1/ <i>Deliverable 1:</i> 1. ToR dan RAB kegiatan FGD/Workshop di tingkat provinsi bersama stakeholders. / <i>ToR and RAB FGD/Workshop activities at the provincial level with stakeholders.</i>
15 Juni / June 15 th , 2024	FGD/Diskusi awal di tingkat provinsi bersama para pemangku kepetingan strategis sebagai kick off advokasi kebijakan, upaya untuk mengumpulkan persepsi stakeholders terkait Perhutanan Sosial dan ketahanan pangan / <i>FGD/Initial discussion at the provincial level with strategic stakeholders as a kick-off for policy advocacy, an effort to gather stakeholder perceptions related to Social Forestry and food security</i>	Capaian 2/ <i>Deliverable 2:</i> 1. FGD di tingkat provinsi terkait ketahanan pangan dan perhutanan sosial di Sumatera Barat / <i>FGD at provincial level related to food security and social forestry in West Sumatra</i>
30 Juni, June 30 th , 2024	Report terkait analisis hasil FGD bersama stakeholder terkait dan pemilihan lokasi kabupaten prioritas. / <i>Report related to the analysis of FGD results with relevant stakeholders and selection of priority district locations.</i>	2. Analisis dan Report dari workshop/FGD serta konsultasi/audiensi/FGD di tingkat provinsi terkait kondisi ketahanan pangan dan potensi hutan untuk menopang hal tersebut / <i>Analysis and Report from workshops/FGDs and consultations/hearings/FGDs at the provincial level related to the condition of food security and the potential of forests to sustain it.</i> 3. Pemilihan lokasi Kabupaten Prioritas untuk advokasi kebijakan / <i>Priority District site selection for policy advocacy.</i>

Juli/ July 2024	Audiensi dan seri FGD di tingkat Nagari/Kabupaten Prioritas / <i>FGD hearings and series at Nagari/Priority District level.</i>	<p>Capaian 3 / <i>Deliverable 3:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Short report hasil diskusi/audiensi dengan stakeholders di tingkat Kabupaten terkait Perhutanan Sosial dan Ketahanan Pangan / <i>Short report on the results of discussions/hearings with stakeholders at the district level related to Social Forestry and Food Security.</i> 2. Draft kasar Policy Brief terkait Perhutanan Sosial dan Ketahanan Pangan / <i>Rough draft of Policy Brief on Social Forestry and Food Security.</i> 3. Draft kasar Legal draft RPJMD/RPJPD Kabupaten/Provinsi terkait Ketahanan Pangan dan Perhutanan Sosial / <i>Rough draft Legal draft of RPJMD/RPJPD District/Province related to Food Security and Social Forestry.</i>
15 Juli/ July 15 th , 2024	Report hasil diskusi/audiensi dengan stakeholders di tingkat Nagari/Kabupaten terkait Perhutanan Sosial dan Ketahanan Pangan. / <i>Report on the results of discussions/hearings with stakeholders at the Nagari/District level related to Social Forestry and Food Security</i>	
30 Juli/ July 30 th , 2024	<p>Batas Waktu untuk / <i>Deadline for:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft kasar Policy Brief terkait Perhutanan Sosial dan Ketahanan Pangan. / <i>Rough draft of Policy Brief on Social Forestry and Food Security.</i> 2. Legal draft RPJMD/RPJPD terkait Ketahanan Pangan dan Perhutanan Sosial / <i>Legal draft of RPJMD/RPJPD related to Food Security and Social Forestry</i> 	
31 Agustus / August 31 st , 2024	Revisi dan penyempurnaan draft policy brief dan legal draft untuk RPJMD/RPJPD / <i>Revision and improvement of the draft policy brief and legal draft for RPJMD/RPJPD</i>	<p>Capaian 4 / <i>Deliverable 4:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Final draft Policy Brief dan legal draft untuk RPJMD/RPJPD Kabupaten/Provinsi terkait ketahanan pangan dan perhutanan social / <i>Final draft Policy Brief and legal draft for RPJMD/RPJPD District/Province related to food security and social forestry.</i> 2. Seremonial event: diseminasi policy brief dan legal draft RPJMD/RPJPD Kabupaten/Provinsi terkait ketahanan pangan dan perhutanan social / <i>Ceremonial event: dissemination of policy brief and legal draft of RPJMD/RPJPD</i>
13 September / September 13 th , 2024	<p>Batas waktu untuk / <i>Deadline for:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Final version policy brief dan legal draft untuk RPJMD / <i>Final version policy brief and legal draft for RPJMD</i> 	
25 September, September 25 th , 2024	Seremonial event: Penyerahan policy brief dan legal draft untuk RPJMD/RPJPD ke pihak Kabupaten / <i>Ceremonial event: Submission of policy brief and legal draft for RPJMD/RPJPD to the District</i>	

		District/Province related to food security and social forestry.
--	--	-----------------------------------------------------------------

LOKASI PEKERJAAN/ WORK LOCATION

Advokasi kebijakan ini akan dilakukan di Sumatera Barat. KSPL dan WRI Regional Sumatera Barat merekomendasikan untuk menjadikan Nagari Pagadih, Kabupaten Agam sebagai salah satu rekomendasi. Vendor juga diberikan keleluasaan untuk mengusulkan alternatif Nagari di Kabupaten yang sama/Kabupaten yang berbeda. Akan tetapi, proses pemilihan lokasi tersebut harus melalui diskusi dengan KSPL dan WRI Regional Sumatera Barat / *This policy advocacy will be carried out in West Sumatra. KSPL and WRI West Sumatra Regional recommend making Nagari Pagadih, Agam Regency as one of the recommendations. Vendors are also given the flexibility to propose alternatives to Nagari in the same district/different district. However, the site selection process must go through discussions with KSPL and WRI West Sumatra Region.*

ANGGARAN/ BUDGET

Mohon menyiapkan pengajuan anggaran dalam mata uang rupiah untuk jasa yang dijelaskan pada "Lingkup Pekerjaan". Anggaran harus mencakup kewajiban pajak yang berlaku dari masing-masing pihak sesuai peraturan pajak Negara Republik Indonesia. / *Please prepare a budget submission in rupiah for the services described in "Scope of Work". The budget must include the applicable tax obligations of each party in accordance with the tax regulations of the Republic of Indonesia.*

Anggaran untuk pekerjaan ini dibatasi pada Rp. 296.000.000 / *The budget for this work is capped at IDR 296.000.000*

Anggaran sudah termasuk kewajiban pajak yang berlaku dari masing-masing pihak / *The budget includes the applicable tax obligations of each party.*

Untuk pengadaan ini, aspek harga dan non-harga dinilai sama pentingnya. Calon penyedia dengan tawaran anggaran terbaik secara keseluruhan yang akan dipilih. / *For this procurement, price and non-price aspects are considered to be of approximately equal importance. The vendor with the best overall budget offering will be selected.*

PANDUAN PENYERAHAN PROPOSAL / GUIDELINES FOR PROPOSAL SUBMISSION

Persyaratan Calon Penyedia/ Prospective Vendor Requirements

- Syarat hukum & pengalaman perusahaan / *Legal & Company Experience Requirements*
 - ✓ Berdomisili dan memiliki legalitas dan perijinan berusaha yang berlaku sesuai dengan peraturan di Indonesia / *Domiciled and have valid legality and business licenses in accordance with regulations in Indonesia.*
 - ✓ Perusahaan memiliki keahlian dan pengalaman melakukan pekerjaan dalam topik Perhutanan Sosial dan aksesibilitas masyarakat lokal, khususnya dalam konteks provinsi Sumatera Barat. dengan catatan kinerja dan integritas yang baik dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang/ *The Company has expertise and experience doing work in the topic of Social Forestry and local community accessibility, especially in the context of West Sumatra province. with a good record of performance and integrity in the past 5 years*

- ✓ Perusahaan memiliki pengetahuan terkait isu ketahanan pangan / *The company has knowledge related to food security issues.*
- ✓ Lebih diutamakan berbasis atau mempunyai kantor perwakilan di Sumatera Barat / *Preferably based or have a representative that is based in West Sumatra.*
- **Syarat Teknis/ *Technical Requirements***
 - ✓ Memiliki pengalaman dalam menggunakan *mixed methods*, terutama dalam mengkombinasikan analisis spasial dengan instrument kualitatif / *Have experience in using mixed methods, especially in combining spatial analysis with qualitative instruments.*
 - ✓ Memiliki pengalaman dalam menggunakan *participatory action research*. Dalam advokasi ini, vendor akan melakukan pendekatan partisipatif dengan masyarakat lokal, guna mendapatkan aspirasi masyarakat dalam mencari solusi untuk permasalahan pangan dan hutan di nagari/kabupaten / *Have experience in using participatory action research. In this advocacy, vendors will take a participatory approach with local communities, in order to obtain community aspirations in finding solutions to food and forest problems in nagari/district.*
 - ✓ Memiliki networking yang kuat dengan stakeholders terkait perhutanan sosial, pangan dan pertanian di Sumatra Barat lebih diutamakan / *Having strong networking with stakeholders related to social forestry, food and agriculture in West Sumatra is preferred.*
 - ✓ Memiliki bukti dan track record terkait publikasi dengan topik serupa / *Have evidence and track record related to publications on similar topics.*
- **Syarat lainnya / *Other Requirements***
 - ✓ Lebih diutamakan memiliki portfolio yang berorientasi sosial / *Having social oriented portfolio is highly desirable.*
 - ✓ Lebih diutamakan memiliki pengetahuan tentang isu konservasi lingkungan dan keberlanjutan/ *Knowledge on environmental conservation and sustainability issues is highly desirable.*
 - ✓ Memiliki kemampuan untuk memberikan konsultasi penuh selama dan setelah (maksimal 1 bulan) periode proyek / *Having ability to provide full consultation during and after (at maximum one month) the project period.*
 - ✓ Memiliki kemampuan bekerja dengan klien untuk memahami persyaratan rinci yang memenuhi kebutuhan dan visi klien / *Having ability to work with clients to understand detailed requirements that meet client needs and vision.*
 - ✓ Memiliki kemampuan mengkomunikasikan proses kerja, ide dan solusi dengan jelas dan efektif kepada klien / *Having ability to communicate the work processes, ideas, and solutions clearly and effectively to teams and client.*

Isi proposal / *Proposal content*

Calon Vendor harus menyerahkan: / *Prospective vendors should submit:*

- ✓ Profil Perusahaan (termasuk upaya keberlanjutan); / *Company Profile (including sustainability efforts);*
- ✓ Pernyataan minat yang menjelaskan tentang tim yang diusulkan dan bagaimana tim tersebut dapat memenuhi persyaratan di atas; / *A statement of interest describing the proposed team and how it meets the above requirements;*
- ✓ CV anggota tim; / *CVs of team members;*
- ✓ Contoh dan referensi pekerjaan yang serupa sebelumnya; / *Examples of and references for similar previous work;*

- ✓ Garis besar metodologi dan rencana kerja yang diusulkan; / *An outline of the proposed methodology and workplan;*
- ✓ Anggaran yang diusulkan dalam format excel (.xls, .xlsx) dengan rincian biaya yang cukup untuk penilaian kewajaran dan kepatuhan terhadap persyaratan penyandang dana kami / *A proposed budget in excel (.xls, .xlsx) format with a breakdown of costs sufficient to assess reasonableness and compliance with our funder requirements*
- ✓ Jadwal pembayaran kompetitif yang mengaitkan nilai pembayaran dengan pencapaian pekerjaan. / *A competitive payment schedule associating invoice amounts with work milestones.*
- ✓ Pernyataan kepatuhan hukum perusahaan, silakan unduh pernyataan [disini](#) / *Statement of corporate legal compliance, please download the statement [here](#).*
- ✓ Pakta integritas Perusahaan, silakan unduh [disini](#) / *Statement of Corporate Integrity, please download [here](#).*

Pernyataan Minat, Tenggat waktu untuk pertanyaan dan Proposal / Expression of Interest, Deadline for Questions, and Proposal

- Pernyataan minat dan pertanyaan tentang RFP ini harus dikirim melalui email ke kontak di bawah ini paling lambat pada tanggal 13 Mei 2024. Jawaban atas pertanyaan akan diberikan kepada semua calon vendor yang telah mengajukan pertanyaan atau menyatakan minat. / *All expressions of interest and questions about this RFP must be received via email to the contact below by Mei 13th, 2024. Answers to the questions will be shared with all parties who have asked questions or otherwise expressed interest.*

Nama Kontak/ *Contact Name*: Procurement WRI Indonesia, Rahmatul Fajra, Srikandi Hidayati

Alamat email/ *Email address*: Procurement-Indonesia@wri.org , Procurement-Indonesia2@wri.org, Procurement-Indonesia3@wri.org

Nama Kontak/ *Contact Name*: Smita Tanaya, Heriza Leni

Alamat email/ *Email address*: smitta.sitanggang@wri.org; Heriza.leni@wri.org

- Semua proposal harus dikirim paling lambat tanggal 17 Mei 2024 dalam format elektronik ke kontak yang sama yang tercantum di atas. / *All proposals must be sent by May 17th, 2024 in electronic format to the same contact listed above.*

EVALUASI DAN SELEKSI/ EVALUATION AND SELECTION

Kriteria Evaluasi/ Evaluation Criteria

Elemen-elemen berikut akan menjadi pertimbangan utama dalam penilaian proposal yang diserahkan untuk RfP ini / *The following elements will be the primary considerations in evaluating all proposals submitted in response to this RFP:*

- Kelengkapan proposal sesuai yang dicantumkan di dalam RfP & kualitas keseluruhan proposal. / *Completeness of proposal as stated in RfP &, overall quality of proposal.*
- Sejauh mana proposal yang diserahkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan WRI Indonesia dan menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang dimaksud; / *The extent to*

which the vendor's proposal fulfills WRI Indonesia stated requirements as set out in the RFP and demonstrates an understanding of the issues at hand

- Unsur Pengalaman Perusahaan: Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis / *Elements of Company Experience: Experience carrying out similar work.*
- Unsur Teknis: Pengalaman pada proyek serupa, pengalaman bekerja di lokasi pekerjaan yang sama, pemahaman atas lingkup pekerjaan yang tercantum dalam RfP, Kualitas metodologi , Program kerja, jadwal kerja/penugasan, dan jangka waktu pelaksanaan / *Technical Element: Experience on similar projects, experience working at the same job site, understanding of the scope of work listed in the RfP, Quality of methodology, Work program, work schedule/assignment, and implementation period.*
- Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : Tingkat Pendidikan, Pengalaman profesional, Sertifikasi / *Elements of Expert Qualification: Level of Education, Professional Experience, Certification*
- Keseluruhan biaya dalam proposal yang diajukan (nilai uang)./ *Overall cost of the vendor's proposal (value for money).*
- Keberlanjutan – WRI Indonesia menghargai keberlanjutan dan faktor-faktor lain yang dianggap setara. WRI Indonesia akan mendukung proposal yang melaksanakan pekerjaan secara berkelanjutan. / *Sustainability – WRI Indonesia values sustainability and all other factors being equal. WRI Indonesia will favor a proposal to more sustainably perform the work.*

Proses Seleksi / Selection Process

Biaya-biaya yang timbul dalam pengembangan proposal tidak dapat ditagihkan ke WRI Indonesia dan seluruh biaya ditanggung oleh calon Vendor. WRI Indonesia dapat memilih calon vendor dengan nilai terbaik tanpa diskusi. Namun demikian, WRI Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan klarifikasi dan bernegosiasi dengan para calon vendor yang menawarkan harga yang kompetitif. / *No proposal development costs shall be charged to WRI Indonesia, and all expenses are to be borne by the bidders. WRI Indonesia may award to the bidder offering best value without discussions. However, WRI Indonesia reserves the right to seek bidder clarifications and to negotiate with those bidders deemed to be within a competitive range.*

WRI Indonesia dapat, atas keinginannya sendiri dan tanpa penjelasan kepada calon vendor, untuk menghentikan kegiatan pengadaan ini tanpa kewajiban apapun terhadap para calon vendor. / *WRI Indonesia may, at its discretion and without explanation to the prospective vendors etc., choose to discontinue this RfP without obligation to such prospective vendors.*